ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN DAERAH

(Studi Kasus Kota Lubuklinggau)

Skripsi Oleh:

METHA ADITYA PUTRI

NIM 01071002003

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TAHUN 2011

S
336.07
Met
a
2011.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN DAERAH

(Studi Kasus Kota Lubuklinggau)

UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh:

METHA ADITYA PUTRI
NIM 01071002003
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: METHA ADITYA PUTRI
NIM	: 01071002003
JURUSAN	: EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH	: KUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN DAERAH (studi kasus kota Lubuklinggau)

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 1 November 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, November 2011

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Dr. Azwardi, SE, M.Si	Drs.H.M. Hibzon, M.Si	Drs.H. Tajuddin Husin, M.Sc
196805181993031003	NIP. 131673861	NIP. 195226111980121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Azwardi, SE, M.Si
196805181993031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Metha Aditya Putri

NIM : 01071002003

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: ***Analisis FAktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Daerah (sudi kasus kota Lubuklinggau)***

Pembimbing

Ketua : Dr. Azwardi, SE, M.Si

Anggota : Drs.H.M. Hibzon, M.Si

Tanggal diuji : 1 November 2011

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada karya orang lain yang saya salin keseluruhan/sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Dengan demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, November 2011

Yang memberi pernyataan,

METERAI TEMPEL F5E7BAAF495377424 6000 DJP

Metha Aditya Putri

NIM. 01071002003

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa,

Nama : Metha Aditya Putri

NIM : 01071002003

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul : **Analisis FAktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Daerah (sudi kasus kota Lubuklinggau)**

Telah kami periksa cara penulisan, grammer, maupun susunan tensesnya dan kami setujui untuk ditempatkan di lembar abstrak.

Inderalaya, November 2011

Pembimbing Skripsi

Ketua,

Dr. Azwardi, SE, M.Si
196805181993031003

Anggota

Drs.H.M. Hibzon, M.Si
NIP. 131673861

Motto :

- Apa yang kau pikirkan, maka itulah yang akan kau dapatkan.
- Untuk mencapai puncak dibutuhkan sebuah proses, tetaplah berdoa dan semangat.
- Jangan bersedih atas kesalahan, karena kesalahan membuat kita belajar bagaimana menjadi orang yang benar.
- Stay prayed up, you should always be able to have a good sleep, knowing that God is always awake.

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Almamaterku
2. Papa dan Mamaku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul:" ***Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan Terhadap Penerimaan Daerah (Studi Kasus kota Lubuklinggau)".*** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai pengaruh beberapa Faktor terhadpa penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Lubuklinggau. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu PDRB perkapita, Jumlah wajib pajak, Luas lahan, dan Jumlah penduduk terhadap variabel dependen yaitu penerimaan daerah serta adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan daerah kota lubuklinggau.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang membacanya, sebagai bahan referensi tambahan kepada mahasiswa dan tokoh akademisi dalam mengembangkan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengaruh likuiditas terhadap pasar uang antar bank di Indonesia dan dapat memberikan gambaran informasi yang jelas kepada masyarakat pada umumnya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Papa Ansori Naib S.I.P M.M dan Mama Nyayu rahayu S.P.D yang selalu mendoakan saya serta telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Prof. DR. H. Taufiq Marwa, M.Si, pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Azwardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Selaku Dosen pembimbing 1 skripsi yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing saya selama dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
6. Drs. Nazeli adnan, M.Si, Sekretaris Jurusan Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H.M. Hibzon, M.S.i Selaku Pembimbing II skripsi yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing saya selama dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Tajuddin Husin, M.Sc selaku dosen penguji Komprehensip
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Saudara-saudara saya Lingga septi lova, Raka pranata putra, Muhammad diaz pahlevi yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi dan telah membantu saya dalam mencari data untuk skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tanpa dukungan dari kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya febrin suharnipa, fany anggraini, Rikha anggraini, lizza avrina, Lys maryani, Lia, kartila PC, Nur rahmadani, Leo yang selalu setia menemani saya dalam suka maupun duka dari awal kita sekolah menengah pertama sampai sekarang.
12. Teman-teman terbaik saya Dera oktarina, Lanari halsa gatri, erni sumiati, friskaulin, sherly maretha, siska fitri ayunda, ipo santika, Feny marissa, rinda Finantri serta teman-teman kost saya anni, hesty, eka, lili, erra, melisa, ririn, mutya, anita terimakasih telah selalu setia menemani saya selama saya merantau dan selalu memberikan semangat, motivasi dan warna kebahagian dalam kehidupan saya . Hendri terimakasih telah mewarnai kehidupan saya, dan selalu memberikan dukungan serta semangat dari awal saya membuat skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2007 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan teman-teman konsentrasi Keuangan Daerah.
14. Seluruh staff dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 2011

Metha Aditya Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iii

SURAT PERNYATAAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR GRAFIK xiv

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 10

1.3. Tujuan Penelitian 11

1.4. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Umum tentang perpajakan

2.1.1. Pengertian pajak 13

2.1.2 Teori yang mendukung pemungutan pajak 14

2.1.3 Fungsi pajak 16

2.1.4 Sistem pemungutan pajak 17

2.1.5 Syarat pemungutan pajak 18

2.1.6 Asas-asas pemungutan pajak 18

2.1.7 Pengelompokan pajak 19

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 112623
TANGGAL: 18 NOV 2011

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan 20

2.2.1 Sejarah Pajak bumi dan bangunan 20

2.2.2 Definisi dan ketentuan pajak bumi dan bangunan. 21

2.2.3 Objek pajak bumi dan bangunan 23

2.2.4 Subjek pajak bumi dan bangunan 27

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan 28

2.3 Potensi 29

2.4 Teori pendapatan asli daerah (PAD) 30

2.5 Teori Aanggaran 34

2.6 Penelitian Sebelumnya 36

2.7 Kerangka Pikiran 38

2.8 Hipotesis 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 40

3.2 Sumber Dan Jenis Data 40

3.3 Teknik pengambilan popupasi 41

3.4 Batasan Variabel 41

3.5 Metode Analisis 43

3.5.1 Pengujian asumsi klasik 44

3.5.2 Pengujian hipotesis. 46

3.5.3 Koefisien determinasi R^2 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 48

4.1.1. Gambaran Geografis, Kota Lubuklinggau 48

4.1.2 penduduk 49

4.1.3 Perkembangan ekonomi kota Lubuklinggau 51

4.1.4 Perkembangan pajak bumi dan bangunan di kota Lubuklinggau.. 56

4.1.5 estimasi persamaan 60

4.2 Hasil Pembahasan 60

4.2.1 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Bumi dan bangunan di Kota Lubuklinggau 60

4.2.2 Pengajuan Asumsi Klasik 62

4.2.2.1Uji Autokorelasi 62

4.2.2.2Uji Multikolonieritas 63

4.2.2.3Uji heterokedastisitas 64

4.2.2.4Uji Normalitas 65

4.2.3 Persamaan regresi Linear Berganda 65

4.2.4. Pengujian Hipotesis 61

4.2.4.1 Uji T-statistik 68

4.2.4.2 Uji F-statistik 69

4.2.5 Koefisien determinasi R^2 70

4.2.6 Pengaruh penerimaan Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan terhadap Penerimaan daerah 71

4.2.8 Potensi pajak bumi dan bangunan di kota Lubuklinggau 76

4.2.8.1 Karakteristik Responden Kelurahan Lubuklinggau selatan 1 76

4.2.8.2 Karakteristik Responden Kelurahan Lubuklinggau Timur 1 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 84

5.2. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Target dan Realisasi penerimaan PBB sektor Perkotaan Kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 9

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk kota lubuklinggau tahun 2002-2010 50

Tabel 4.2 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 53

Tabel 4.3 Pertumbuhan Pendapatan perkapita kota Lubuklinggau tahun 2002-2009 55

Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah wajib pajak dan realisasi pajak 9bumi dan bangunan kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 57

Tabel 4.5 Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 58

Tabel 4.6 Luas lahan dan Jumlah objek pajak di kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 59

Tabel 4.7 Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen 61

Tabel 4.8 Uji R^2 62

Tabel 4.9 Estimasi Persamaan regresi berganda 63

Tabel 4.10 Uji F 65

Tabel 4.11 Autokorelasi 67

Tabel 4.12 Multikolonieritas 68

Tabel 4.13 Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 71

Tabel 4.14 Uji T 72

Tabel 4.15 Uji F 73

Tabel 4.16 Uji R^2 74

Tabel 4.17 Data sample perkembangan NJOP tahun 2011 di kecamatan Lubuklinggau selatan 1 76

Tabel 4.18 Jumlah objek pajak potensi dan realisasi PBB berdasarkan NJOP tahun 2011 kecamatan Lubuklinggau selatan 1 78

Tabel 4.19 Data sample perkembangan NJOP tahun 2011 di kecamatan Lubuklinggau Timur 1 80

Tabel 4.20 Jumlah objek pajak potensi dan realisasi PBB berdasarkan NJOP tahun 2011 kecamatan Lubuklinggau Timur 1 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran penelitian 38

Gambar 4.1 Penyebaran heterokedastisitas 66

Gambar 4.2 sebaran variabel pengganggu 67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.Grafik Realisasi Produk Domestik Regional Bruto di kota lubuklinggau tahun 2002-2010 54

ABSTRAKSI

Putri, Metha Aditya. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotan Terhadap Penerimaan Daerah (Studi kasus kota Lubuklinggau).* Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pembimbing: (1) Dr. Azwardi, M.Si, (2) Drs.H.M. Hibzon, M.Si.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pemerintahan pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini mengukur besaran pengaruh variabel independen yang terdiri dari PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, jumlah luas lahan, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB sektor perkotaan dan pengaruh Penerimaan pajak Bumi dan bangunan sektor perkotaan terhadap penerimaan daerah di Kota Lubuklinggau dan melihat seberapa besar potensi Penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Luas lahan yang berpengaruh secara signifikan sebesar 0,005% terhadap penerimaan PBB sedangkan variabel PDRB perkapita, jumlah wajib pajak, luas lahan, dan jumlah penduduk berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan PBB. Akan tetapi, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan semua variabel mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Sedangkan pengaruh penerimaan PBB sektor perkotaan terhadap penerimaan daerah kota Lubuklinggau memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,000%. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. dengan sumber dana yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.

Kata Kunci: PBB, Potensi, PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, jumlah luas lahan, dan jumlah penduduk.

ABSTRACT

Putri, Metha Aditya. 2011. An Analysis of Factors that Influenced Land and Building Tax Revenues on Regional Revenues (A Case Study of Lubuk Linggau City). Thesis. Department of Development Economics, Faculty of Economics, Sriwijaya University. Advisors: (1) Dr. Azwardi, M. Si., (2) Drs. H. M. Hibzon, M. Si.,

Land and building taxes are the taxes designated for the central government and some amount of their revenues is for the local government. This research was aimed at determining the influence of independent variables – taxes for capita, number of tax payers, size of land areas, and number of the city population – on the tax revenues, the influence of the city land and building taxes on the regional revenues of Lubuk Linggau, and the potential for such revenues. The analyses show that the land size variable had a significant influence on the tax revenues as much as 0.005% wheras the factors such taxes per capita, number of tax payers, land size, number of the city population did not have much influence. Although they were not very significant, all these factors showed a positive influenced. The land and tax revenues of Lubuk Linggau City contributed a significant influence on the city renenues as indicated by 0.000%. The City's effort to increase the tax revenues may help the development; with such revenues the welfare of the citizens may improve.

Key wrods: tax, land and building, per capita, revenues, tax payer, land size, population

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA LEMBAGA BAHASA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Pada era otonomi daerah, setiap daerah harus membenahi dan menyesuaikan penataan sistem pemerintahan dan perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah terciptalah otonomi yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah sifatnya lebih terikat. Jadi penggalian sumber daya alam dan peningkatan pendapatan asli daerah, diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebetulnya di latarbelakangi oleh dua tujuan pokok, yaitu : 1) Menetralisasi kesenjangan antar daerah sekaligus meredakan konfliksitas antar daerah, 2) Dalam rangka menghadapai Globalisasi Ekonomi. Untuk menwujudkan Otonomi daerah yang bertanggungjawab, diperlukan adanya upaya peningkatan Sumber daya manusia yang baik. Dalam hubungan ini menurut Silalahi dalam Santoso dan Rahayu (2000:11) :

1. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, dan tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

UPT PERPUSTAKAAN

2. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.

3. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation.*

4. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang intinya pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang intinya bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Guna mendukung pembangunan daerah dan mengembangkan perekonomian daerah secara optimal, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya, sehingga tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dapat tercapai. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan rumah tangga pemerintah. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup, terutama untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1, di sebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2) Dana perimbangan
3) Lain-lain pendapatan

Sementara Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Akan tetapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan sumber-sumber hasil pendapatan yang telah ada. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah :

1. Pajak daerah, antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak balik nama, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian C, pajak parkir, dan pajak lain-lain. Pajak daerah ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan pemerintah No 565/2001 tentang pajak daerah.

2. Retribusi daerah, antara lain: Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi biaya cetak kartu, retribusi pemakaman, retribusi parkir tepi jalan, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemadam kebakaran dan lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No 34/2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan peraturan pemerintah No. 6/2001 tentang retribusi daerah.

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil deviden BUMD.

4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain: hasil penjualan kekeayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yangs sah.

Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 oktober 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuklinggau, Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai kota Administratif. Berlakunya undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, status kota Lubuklinggau di tingkatkan menjadi kota, dan pada tanggal 17 oktober 2001 di resmikan mejadi daerah otonom. Dengan resmi di bentuknya kota Lubuklinggau sebagai daerah yang sudah otonom, Lubuklinggau di harapkan dapat menjadi kota yang mandiri dan dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat menambah hasil pendapatan daerah kota Lubuklinggau itu sendiri.

Pendapatan daerah kota Lubuklinggau tahun 2002-2010 yang berasal dari Dana perimbangan, bagian Lain-lain pendapatan yang sah dan Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) cenderung meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2009 jumlah persentasenya menurun sampai 95,05% sedangkan pada tahun 2010 belum dapat dilihat jumlah persentasenya apakah naik atau turun. *(data terlampir)*

Pendapatan asli daerah kota Lubuklinggau, dapat dilihat dari tahun 2002 sampai 2010 realisasi pendapatan asli daerah selalu melebihi target yang di tentukan. Ada tiga jenis penerimaan yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun anggaran 2002-2010, realisasi pajak daerah yang diterima oleh pemerintah kota Lubuklinggau sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima yaitu sebesar 130,62% per tahunnya. Namun jika dicermati lebih lanjut maka persentase pertumbuhan PAD yang di kelola oleh pemerintah kota Lubuklinggau terlihat fluktuatif dan terkadang terlihat semakin menurun. Pada tahun 2005 jumlah persentasenya hanya mencapai 73,59% akan tetapi pada tahun 2006 naik menjadi 183,35 % dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2010 yaitu sebesar 102,48%. *(data terlampir)*

Begitu juga dengan pajak daerah perjenis di kota Lubuklinggau dari tahun 2002-2010. pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota Lubuklinggau rata-rata realisasi perolehan masing-masing pajak daerah pada kurun waktu 2002-2010 berkisar 123, 70% per tahun. Angka realisasi pajak yang tertinggi yaitu diperoleh dari realisasi pajak penerangan jalan dan yang terendah adalah pajak parkir. Jika dicermati lebih lanjut, dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak daerah perjenis di kota Lubuklinggau terlihat fluktuatif tetapi lebih cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah kota Lubuklinggau dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu melakukan

penjaringan wajib pajak dan melakukan pembinaan terhadap wajib pajak daerah misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran, wajib pajak hiburan serta menambah area parkir. *(data terlampir)*

Adanya situasi keadaan ekonomi yang melaju pesat dan dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang aman dapat menentukan dan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa usaha telah dilakuka oleh pemerintah daerah kota Lubuklinggau untuk mewujudkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Secara garis besar usaha yang dilakukan adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/ pengetahuan di bidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan pada pelayanan satu atap. dan menambahkan fasilitas cakupan pelayanan dengan menambah sarana dalam menunjang kegiatan, misalnya dengan membuat panggung reklame yang ada di wilayah kota Lubuklinggau.

Dari sejumlah penjelasan tentang pajak daerah diatas dan disertai penjelasan yang menerangkan berapa besar realisasi pajak daerah yang di terima tidak terlalu besar atau cenderung berfluktuatif. Pajak merupakan komponen dari sumber Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam negeri (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pembiayaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Krisnawati (2008:7), menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari

bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari SDA, DAU, DAK.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan termasuk dalam dana perimbangan, akan tetapi dengan di tetapkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah sudah tentu akan menimbulkan beban bagi daerah terutama kesiapan dari segi kelembagaan, legalitas, kemampuan SDM, pembiayaan serta sistem dan manajemen basis data PBB sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan PBB. Begitu pula untuk pajak yang daerah yang lain, apabila terjadi perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka akan menimbulkan beban bagi instansi-instansi yang terkait di dalam nya .

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama, dan merupakan sektor penerimaan dalam negeri yang berpotensial. Oleh karena itu peranan sektor pajak sangat besar, terutama untuk menunjang pembiayaan pembangunan pada tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu penerimaan negara dalam sektor pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana prasarana kepentingan umum. Oleh sebab itu nyatalah bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Lubuklinggau merupakan wilayah dengan pengenaan PBB sektor perkotaan, karena di kota Lubuklinggau sektor perkotaan memberikan kontribusi

yang cukup besar sedangkan sektor pedesaan tidak memberikan kontribusi sedikitpun terhadap penerimaan daerah.

Dari tahun 2002-2005 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan stabil yaitu 100%, pada tahun 2006-2008 Realisasi penerimaan meningkat menjadi 100,70%, pada tahun 2009-2010 menurun kembali menjadi masing-masing 100%.

Target dan Realisasi penerimaan PBB sektor Perkotaan Kota Lubuklinggau dapat di lihat pada table 1.4 berikut :

TABEL 1.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PBB SEKTOR PERKOTAAN KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2002-2010
(Dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Tase pencapaian
2002	274.559.130	274.559.130	100
2003	419.820.188	419.820.188	100
2004	606.050.283	606.050.283	100
2005	908.485.782	908.485.782	100
2006	1.531.983.316	1.542.718.221	100,70
2007	1.802.333.313	1.814.962.613	100,70
2008	2.002.592.570	2.016.625.125	100,70
2009	2.189.971.930	2.189.971.930	100
2010	2.340.872.865	2.327.728.549	99

Sumber : Kantor DPPKA kota Lubuk linggau

Di lihat dari data di sebelumnya, realisasi penerimaan pengelolaan Pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkotaan selama sembilan tahun terakhir yaitu 2002-2010 hampir selalu memenuhi target yang ditetapkan. Namun sejauh ini belum diketahui apakah dalam penetapan target sudah mencerminkan potensi yang sebenarnya. Ditetapkannya Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang sangat fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Dalam pencapaian realisasi yang selalu memenuhi target ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB perkapita), jumlah wajib pajak, luas lahan, dan Jumlah Penduduk. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu peneliti memilih Judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Daerah" (Studi kasus Kota Lubuklinggau).** Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pajak bumi dan bangunan dalam sektor perkotaan sajak, karena di kota lubuklinggau hanya pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan saja yang memberikan kontribusi yang banyak terhadap penerimaan daerah di bandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dimuka maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Lubuklinggau

2. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Bagaimana Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lubuklinggau

1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Lubuklinggau
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Untuk mengetahui bagaimana potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lubuklinggau

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah bahan pustaka dan informasi para akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya pengetahuan di bidang ekonomi keuangan suatu daerah.

b. Manfaat Operasional

Secara operasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian khususnya di bidang ekonomi keuangan suatu daerah serta dapat menentukan arah kebijakan yang baik untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agusyana, yus dan Islandscrip, 2011. *Olah data skripsi dan penelitian dengan SPSS 19*, kompas Gramedia, Jakarta

Asngari, Imam, 2008. *Modul Teori dan Praktikum Ekonometrika,* Laboraturium komputer Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang.

Badan Pusat statistik, 2009, *Lubuklinggau Dalam Angka 2009*. Lubuklinggau.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.*

_____, *Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 dan Undang -Undang RI No.33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005.

_____, *Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah.*

Istiqomah, Mu'minatus sholicha. Perilaku Wajib pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Gresik. *Jurnal Logos*, Vol.3, No.1, Juli 2005.

Judisseno, Rimsky K, 2000. *Pajak dan Strategi Bisnis*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Krisnawati, Ayu. 2008. Analisis Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengaruh dari Perkembangan Ekonomi Kota Palembang, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang.

Nastiti, Mutia Amana. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Daerah (Studi Kasus di kabupaten Kendal), *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam, Yogyakarta

Parera, Adrianus Firminus. 2006. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Sikka, *Tesis* S-2 Program pacasarjana Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.

Rahayu Puji Retno, Santosa Budi Purbayu. 2000. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*

Roberts, K Roland, Kim Seung Gyu and Cho Seong-Hoon. 2009. *Measuring The Effects Of a Land Value Tax on land Development*, Spinger Science+Business media B.V.

Rumbia, Wali Aya. 2009. *Tinjaun tentang Perkembangan Peneriman Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kendari.*

Saepudin, 2008. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatra Utara, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Sumatra xUtara, Medan.

Sari, yulia anggara. 2008 .*Analisis Evektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung,*

Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas), *jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, Juli 2005, Hal.19-29.

Schwab, M Robert and Oates, E Wallace. 1999 *The* Impact Of Urban Land Taxation: The Pittsburgh Experience, *National tax Journal*, Vol.50, No 1, pp.01-21.

Syahyati, Riya. 2007. Analisis Potensi pajak Hotel di Kota Palembang, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang.

Simanjuntak, A jackson. 2000. Analisis Perencanaan dan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) di Kotamadya Medan, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Medan.

Sutawijaya, Adrian. 2003. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Nilai Objek Pajak (NJOP) PBB di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang*. Vol 15, No , Februari 2003.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, jakarta.